

POHON KINERJA			PENERJEMAHAN KEDALAM RENSTRA 2025-2029								DO	RUMUS PERHITUNGAN
			TUJUAN DAN SASARAN				PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI KEPMENDAGRI 3406)					
KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN		
Kinerja Strategis : Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks					Tingkat Kepuasan anggota DPRD adalah tingkat kepuasan anggota DPRD dalam fasilitasi yang dilaksanakan oleh sekretariat DPRD dengan diukur dari Indeks kualitas fasilitasi Sekretariat DPRD bagi peningkatan kinerja DPRD diukur dari kualitas pelayanan terhadap unsur-unsur sebagai berikut : - Fasilitasi Pembahasan Raperda merupakan fasilitasi pembahasan Raperda yang berasal dari prakarsa DPRD atau prakarsa eksekutif sesuai Propemperda - Peningkatan Kapasitas DPRD merupakan fasilitasi bimbingan teknis yang diikuti oleh anggota DPRD dalam satu tahun - Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD diperoleh dari hasil survey pengawasan penggunaan anggaran (rapat dengar pendapat umum/monev/rapat Alat Kelengkapan DPRD, pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan pelaksanaan reses - Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran terdiri dari survey pada pembahasan Pertanggungjawaban APBD, KUA-PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Perubahan APBD dan Pembahasan APBD	Rata-rata nilai IKM Fasilitasi Sekretariat DPRD (IKM Fasilitasi Pembahasan Raperda serta Peningkatan Kapasitas DPRD, IKM Fasilitasi Fungsi Pengawasan DPRD dan Pembahasan Anggaran Daerah)
Kinerja Urusan : Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD	Persentase Agenda Pembentukan Perda APBD yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD Persentase Agenda Pengawasan yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD. Persentase Agenda Penganggaran Daerah yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD.	%		Meningkatnya Fasilitasi Fungsi DPRD	Persentase Agenda Pembentukan Perda yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD Persentase Agenda Pengawasan yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD. Persentase Agenda Penganggaran Daerah yang Terlaksana sesuai Rencana Kerja DPRD.	%					Rencana agenda pembentukan perda terdiri dari: - Fasilitasi Perda yang diajukan oleh eksekutif - Fasilitasi Perda yang diajukan oleh inisiatif DPRD Rencana agenda pengawasan terdiri dari: - Agenda Pengawasan Penggunaan Anggaran maupun pengawasan ke unit kerja - Agenda Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Rencana Agenda penganggaran terdiri dari : - Agenda pembahasan APBD - Agenda pembahasan APBD Perubahan - Agenda pembahasan KUA dan PPAS - Agenda pembahasan KUA dan PPAS Perubahan - Agenda pembahasan pertanggungjawaban APBD	Jumlah Agenda perda yang difasilitasi dibagi dengan jumlah agenda perda yang harus difasilitasi dikali dengan 100% Jumlah agenda pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang telah difasilitasi dibagi dengan jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang harus difasilitasi dikali 100%. Jumlah agenda penganggaran yang telah terfasilitasi dibagi dengan jumlah agenda penganggaran yang seharusnya difasilitasi dikali 100%
Kinerja Taktikal 1: Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Pembahasan Perda	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Tepat/Tidak Tepat % %				%	04:02:02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Persentase Penetapan Ranperda Tahun N Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Tepat/Tidak Tepat % %	-Waktu penetapan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Fasiliasi Raperda yang dibahas di Tahun N merupakan Fasilitasi rancangan peraturan daerah dalam tahun N Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD dan layanan administrasi tugas DPRD	1.Tepat 2.Tidak Tepat Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N dibagi Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N x 100% Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD dan Layanan Administrasi Tugas DPRD, dibagi dengan Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Layanan Administrasi Tugas DPRD yang direncanakan dikali 100%
Kinerja Taktikal 2: Terfasilitasinya Pembahasan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	%				%	4.02.02.2.01	Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi	%	Indikator yang mengukur Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang Difasilitasi. - Perda adalah Peraturan Daerah yang dibahas bersama dengan eksekutif. - Peraturan DPRD meliputi Tata Tertib DPRD dan kode etik DPRD yang disusun.	Jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi pembahasannya dibagi dengan jumlah Perda dan Peraturan DPRD yang harus difasilitasi pada tahun berjalan dikali dengan 100%
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Propemperda yang Difasilitasi Pembahasannya	Dokumen					4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen	Menyusun rencana Perda yang akan dibahas di tahun berikutnya, yang akan dibahas oleh DPRD	Jumlah dokumen propemperda yang difasilitasi pembahasannya

POHON KINERJA			PENERJEMAHAN KEDALAM RENSTRA 2025-2029								DO	RUMUS PERHITUNGAN
			TUJUAN DAN SASARAN				PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI KEPMENDAGRI 3406)					
KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN		
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Raperda/Raperda Inisiatif	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Dokumen					4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen	Pembahasan Rancangan Perda adalah rancangan Perda yang dibahas eksekutif bersama dengan DPRD	Jumlah dokumen hasil pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi
Kinerja Operasional Terfasilitasinya Fasilitasi Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen					4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan meliputi penyusunan kajian Perda termasuk JDIH, e-Radar, si-Kawan, dan cetak Peraturan Perundang-undangan.	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan yang difasilitasi
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah NA yang Difasilitasi Penyusunannya	Dokumen					4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen	Naskah akademik adalah pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan suatu masalah tersebut dalam rancangan perda terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masalah.	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi penyusunannya dalam 1 tahun
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penyusunan Tata Tertib DPRD	Dokumen					4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen tata tertib DPRD adalah tata tertib DPRD dan kode etik DPRD	Jumlah dokumen tata tertib DPRD yang disusun/difasilitasi dalam 1 tahun
Kinerja Taktikal 2: Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas DPRD	%				%	4.02.02.2.04	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD sesuai standart	%	Fasilitasi peningkatan kapasitas DPRD yang meliputi : 1. Bimtek DPRD 2. Orientasi DPRD sesuai standart yaitu sesuai dengan SOP yang telah ditentukan	Jumlah fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD dibagi jumlah kegiatan peningkatan kapasitas DPRD yang harus difasilitasi dikali 100%
Kinerja Operasional Terlaksananya Orientasi DPRD	Jumlah Peserta Orientasi DPRD	Orang					4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen	Orientasi DPRD (orientasi DPRD adalah pembekalan anggota dewan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Orientasi DPRD
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Mengikuti Pendalaman Tugas DPRD	Orang					4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	Fasilitasi Pendalaman Tugas DPRD meliputi fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD yang terfasilitasi dalam 1 tahun
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kegiatan yang Difasilitasi Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kegiatan					4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	Fasilitasi Penyediaan Kelompok Pakar dan tim ahli untuk menunjang Kinerja Fungsi DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang tersedia dalam 1 tahun

POHON KINERJA			PENERJEMAHAN KEDALAM RENSTRA 2025-2029								DO	RUMUS PERHITUNGAN
			TUJUAN DAN SASARAN				PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI KEPMENDAGRI 3406)					
KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN		
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang					4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	Facilitasi Penyediaan Tenaga Ahli fraksi adalah fasilitas penyediaan tenaga ahli fraksi untuk menunjang kinerja dan fungsi fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia dalam 1 tahun
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen					4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	Facilitasi Penyusunan Rencana Kerja DPRD adalah Fasilitas Penyusunan Rencana kerja yang direncanakan kegiatan DPRD dalam 1 tahun	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD yang tersusun dalam 1 tahun
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen					4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	Dokumen publikasi antara lain karangan bunga, media online, surat kabar, media elektronik, radio. Sedangkan Dokumentasi DPRD terdiri dari membuat foto maupun video kegiatan DPRD.	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD yang tersedia dalam 1 tahun
Kinerja Taktikal 2: Terfasilitasinya Layanan Administrasi Tugas DPRD	Persentase Layanan Administrasi Tugas DPRD sesuai Standart	%				%	4.02.02.2.08	Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Layanan Administrasi Tugas DPRD sesuai Standart	%	Layanan administrasi tugas DPRD adalah fasilitas koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD, penyusunan laporan kinerja DPRD sesuai standart	Persentase jumlah layanan administrasi tugas DPRDdifasilitasi sesuai standart / jumlah layanan administrasi tugas DPRD yang harus difasilitasi dikalikan dengan 100%.
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen					4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD meliputi fasilitas pelaksanaan tugas AKD (Alat Kelengkapan Dewan) Badan Musyawarah, tugas Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Kehormatan.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD yang Disusun	Dokumen					4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Dokumen	Facilitasi penyusunan laporan fraksi merupakan fasilitas penyusunan laporan fraksi, alat kelengkapan, dan kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
Kinerja Taktikal 1: Meningkatnya Kualitas Penyampaian Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	- Persentase Penyampaian Rekomendasi Penganggaran - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%				%	04:02:02	Program Dukungan dan Fungsi DPRD	Persentase Penyampaian Rekomendasi Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	Persentase Penyampaian Rekomendasi Penganggaran dan Pengawasan merupakan Persentase penyampaian rekomendasi Penganggaran dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang telah terfasilitasi dalam 1 tahun	Penyampaian rekomendasi penganggaran dibagi dengan dokumen penganggaran yang dibahas dikali 100%. Penyampaian rekomendasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan setiap bulan dibagi dengan dokumen yang dilaksanakan pengawasan dalam 1 tahun dikali 100%
Kinerja Taktikal 2: Terfasilitasinya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraaan Pemerintahan yang Diawasi	%				%	4.02.02.2.03	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Penyelenggaraaan Pengawasan Pemerintahan yang Difasilitasi	%	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan permintaan/jadwal agenda anggota DPRD	Jumlah fasilitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana dibagi dengan jumlah permintaan/jadwal agenda DPRD terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dikalikan dengan 100%
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen					4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen	Pengawasan penggunaan anggaran memfasilitasi anggota DPRD dalam pelaksanaan pengawasan meliputi: - Sidak - Hearing - mengundang OPD mitra kerja komisi DPRD - Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan dan Ganti Rugi Keuangan Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitas pengawasan penggunaan anggaran
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen					4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen	Facilitasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah fasilitas yang dilaksanakan oleh sekrteriat DPRD mengenai laporan tahunan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD mengenai kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran	Jumlah dokumen rekomendasi hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

POHON KINERJA			PENERJEMAHAN KEDALAM RENSTRA 2025-2029								DO	RUMUS PERHITUNGAN
			TUJUAN DAN SASARAN				PEMETAAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN (SESUAI KEPMENDAGRI 3406)					
KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN		
Kinerja Taktikal 2: Terfasilitasinya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat Hasil Reses yang Ditindaklanjuti menjadi Pokir	%				%	4.02.02.2.05	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Aspirasi Masyarakat Hasil Reses yang Ditindaklanjuti menjadi Dokumen Pokir	%	Reses adalah kegiatan anggota DPRD di luar masa sidang, dimana mereka mengunjungi daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti menjadi usulan.	Jumlah usul Pokir yang diinput di SIPD dibagi jumlah usul Pokir hasil reses dikali dengan 100%
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Reses yang Terfasilitasi	Dokumen					4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	- Pelaksanaan reses sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Pasal 87 ayat 3 bahwa Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses kecuali, pada persidangan terakhir dari 1 periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan).	Jumah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan reses dalam 1 tahun (3x dalam 1 tahun) kecuali pada masa akhir periode keanggotaan periode (2x dalam 1 tahun)
Kinerja Operasional Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Laporan Pokok-Pokok Pikiran Masyarakat	Dokumen					4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen	Dokumen pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan usulan masyarakat berdasarkan hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses	Jumlah dokumen pokok-pokok pikiran DPRD yang disusun dalam 1 tahun (3 x reses) kecuali pada masa akhir periode keanggotaan periode (2x dalam 1 tahun)
Kinerja Taktikal 2: Terfasilitasinya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Kebijakan Anggaran yang Dibahas sesuai Aturan	%				%	4.02.02.2.02	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi sesuai aturan	%	Kebijakan Anggaran meliputi: Pembahasan kebijakan anggaran dalam kegiatan DPRD mencakup persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD pada tahun anggaran N+1, Perubahan APBD pada tahun anggaran ke-N, Pertanggungjawaban APBD pada tahun anggaran N-1, membuat nota kesepakatan yang meliputi pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang diajukan oleh Kepala Daerah pada tahun anggaran N.	Jumlah fasilitasi pembahasan kebijakan anggaran dibagi dengan pembahasan kebijakan anggaran yang telah ditentukan pelaksanaannya sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku dikali dengan 100%
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Pembahasan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA PPAS dan perubahan KUA PPAS	Dokumen					4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	Fasilitasi pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) dengan indikator merupakan fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS pada tahun anggaran N	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembahasan KUA dan PPAS dalam 1 tahun
							4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS merupakan Fasilitas Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tahun anggaran N	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS dalam 1 tahun
							4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan APBD merupakan fasilitasi pembahasan pada tahun anggaran N+1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembahasan APBD dalam 1 tahun
							4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan APBD Perubahan merupakan fasilitasi pembahasan APBD Perubahan pada tahun anggaran N	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembahasan APBD Perubahan dalam 1 tahun
Kinerja Operasional Terlaksananya Fasilitas Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen					4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	Fasilitasi Pembahasan Pertanggungjawaban APBD merupakan Fasilitas Pembahasan Pertanggungjawaban APBD pada tahun anggaran N-1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pembahasan Pertanggungjawaban APBD dalam 1 tahun